RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dipulikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan ringkasan LPPD Tahun 2023, berisi laporan kinerja Pemerintahan Kabupaten Sukabumi selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1), dan pasal 71 ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, terletak di selatan Provinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 Km dari Ibukota Negara (Jakarta). Meskipun Kabupaten Sukabumi terlahir pada tanggal 10 September 1870, namun secara formal pembentukan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat.

Kabupaten Sukabumi memiliki 47 Kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.162 km^2 atau 416.220,94 ha (11,21% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas Pulau Jawa). Wilayah Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Samudera Indonesia di sebelah barat dan wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat di sebelah timur.

Kabupaten Sukabumi termasuk daerah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata adalah 25^{0}C – 30^{0}C, memiliki tipe iklim B (basah) dengan curah hujan rata-rata per tahun adalah 2.500-3000 mm. Topografi wilayahnya sangat variatif mulai dari wilayah dengan tingkat kelerengan yang datar, landai, curam sampai dengan sangat curam dengan rata-rata slope 18,6%. Bentuk permukaan tanah (morfologi) pada umumnya bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit, sampai bergunung. Ketinggian wilayahnya dari 0 sampai dengan 2.958 m dpl (puncak Gunung Gede). Daerah datar umumnya terdapat di daerah pantai dan kaki gunung yang sebagian besar merupakan persawahan. Sementara sebagian daerah selatan merupakan daerah pesisir dan berbukit dengan ketinggian berkisar 0 – 2.960 m dpl. Struktur geologi wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi zona utara dan zona selatan, dengan batas Sungai Cimandiri yang mengalir dari arah timur laut ke barat daya. Zona utara merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh vulkan, dengan jenis tanah bertekstur sedang (tanah lempung) dan termasuk ke dalam tanah dengan kedalaman tanah sangat dalam (lebih dari 90 cm). Jenis tanah di bagian utara pada umumnya terdiri dari tanah latosol, andosol dan regosol. Kondisi ini menyebabkan lahan di zona utara sebagian besar merupakan lahan subur, dimana terdapat kawasan perkebunan, persawahan dan kegiatan pertanian lainnya.

Sedangkan zona selatan merupakan kawasan yang berbukit-bukit dengan kedalaman tanah kurang dalam (kurang dari 90 cm) dan cenderung kurang subur sehingga kawasan ini cenderung dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering, perkebunan dan kehutanan. Jenis tanah di bagian tengah pada umumnya terdiri dari latosol dan podzolik, sedangkan di bagian selatan sebagian besar terdiri dari laterit, grumosol, podzolik dan alluvial. Jenis tanah ini termasuk tanah yang agak peka erosi dan longsor. Di wilayah Kabupaten Sukabumi banyak dijumpai mata air berasal dari dasar lembah atau kaki perbukitan. Munculnya mata air dari tempat-tempat tersebut disebabkan adanya lapisan batuan kedap air di bawahnya, sehingga peresapan tidak terus ke dalam melainkan ke arah lateral dan muncul di kaki-kaki tebing/lembah atau kaki perbukitan. Sementara air permukaan yang sebagian besar terdiri atas sungai-sungai dan anak-anak sungainya membentuk 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu: DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cipelang, DAS Cikaso, DAS Cibuni dan DAS Cibareno.

Gambar 1.
Peta Kabupaten Sukabumi

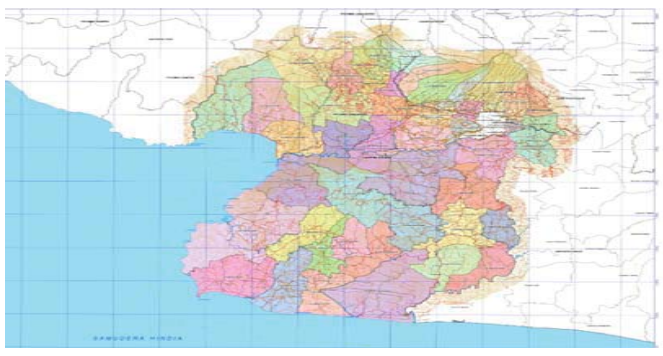

Gambaran jumlah penduduk Penduduk Kabupaten Sukabumi sampai dengan semester II (dua) tahun 2023 (per-Desember 2023) berjumlah 2.790.320 jiwa terdiri 1.416.916 laki-laki dan 1.373.404 perempuan dengan Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 673 orang per Km2. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 dapat terlihat pada tablel 1.

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 – 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km2
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2012	1.215.693	1.177.498	2.393.191	575
2	2013	1.222.814	1.185.603	2.408.417	579
3	2014	1.229.168	1.192.945	2.422.113	582
4	2015	1.234.673	1.199.548	2.434.221	585
5	2016	1.281.738	1.222.203	2.503.941	587
6	2017	1.293.563	1.230.429	2.523.992	607
7	2018	1.294.826	1.251.499	2.546.325	609
8	2019	1.309.395	1.262.495	2.571.890	617
9	2020	1.333.443	1.293.319	2.626.762	631
10	2021	1.375.215	1.333.751	2.708.966	651
11	2022	1.402.812	1.359.688	2.762.500	666
12	2023	1.416.916	1.373.404	2.790.320	673

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Rumus : $\frac{n-(n-1)}{n-1} \times 100\%$

Tabel 2
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2023

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,87	69,71	1,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,69	1,02	-39,64
3	Tingkat Kemiskinan	7,34	7,01	-4,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,77	7,32	-5,79
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,12	5,17	0,98
7	Pendapatan Per Kapita	27472,13	29373,86	6,92
8	Indeks Gini	0,309	0,355	14,89

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia

2016 dan meningkat menjadi 73,12 poin pada tahun 2022. IPM Kabupaten Sukabumi berada diatas target yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi, IPM merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga komponen esensial kualitas hidup yaitu pendidikan melalui gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kesehatan melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH) dan ekonomi melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP). Oleh karena itu, IPM sering dijadikan sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

IPM Kabupaten Sukabumi mengalami trend yang meningkat dari 66,87 poin pada tahun 2019 menjadi 69,71 poin pada tahun 2023. IPM Kabupaten Sukabumi berada di atas target yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, dimana target yang diharapkan pada tahun 2023 sebesar 67,99 poin dan berhasil terealisasi sebesar 69,71 poin atau tercapai sebesar 102,53 persen (Tabel 4.2). Lebih lanjut BPS mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi empat kelompok, yaitu tingkat pembangunan rendah (IPM<60), sedang (60≤IPM>70), tinggi (70≤IPM>80), dan sangat tinggi (IPM≥80). Berdasarkan pengkategorian tersebut, IPM Kabupaten Sukabumi sebesar 67,64 poin termasuk kedalam kelompok pembangunan manusia yang sedang.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah IPM Jawa Barat. IPM Jawa Barat sebesar 72,03 poin pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 74,24 poin pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, IPM Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah IPM Nasional. IPM Nasional sebesar 71,92 poin pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 74,39 poin pada tahun 2023. Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, IPM Jawa Barat terhadap IPM Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3. IPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2023

IPM	Target	Realisasi	%
2019	65,96	66,87	101,38
2020	66,08	66,88	101,21
2021	66,41	68,33	102,89
2022	67,60	68,87	101,88
2023	67,99	69,71	102,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2024

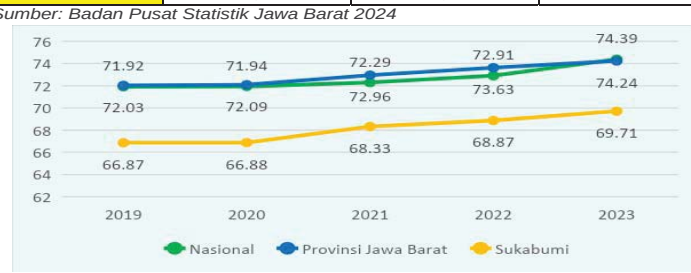

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 2. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Target Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (poin)

Berdasarkan sebaran Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Sukabumi berada diposisi keempat terbawah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, berada di bawah Kabupaten Indramayu sebesar 70,19 poin, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 70,33 poin (Gambar 2). Namun begitu bila dilihat dari nilai pertumbuhan, Kabupaten Sukabumi menempati peringkat ke empat dalam pertumbuhan IPM dengan nilai pertumbuhan IPM sebesar 1,22 persen pada tahun 2023 (Gambar 2).

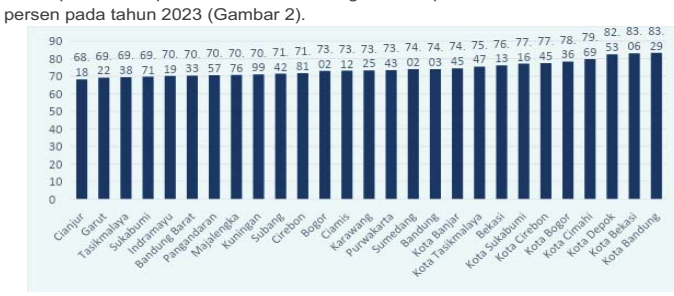

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 3. Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi dengan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023

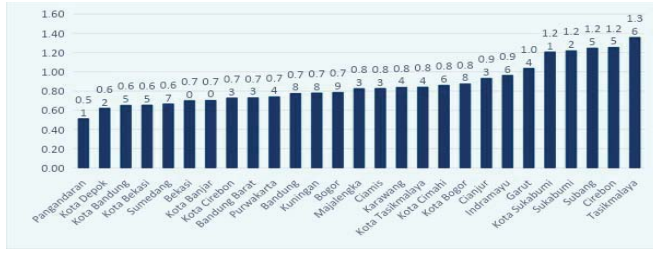

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 4. Grafik Perbandingan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Sukabumi dengan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023

1.1. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Sukabumi 2016-2022

Peningkatan IPM Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya yaitu Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*).

1.1.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang dirasakan oleh anak pada umur tertentu, digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 4. HLS Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

HLS	Target	Realisasi	%
2019	13,12	12,22	93,14
2020	13,32	12,23	91,82
2021	13,52	12,24	90,53
2022	12,38	12,25	98,95
2023	12,42	12,38	99,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 5. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

HLS Kabupaten Sukabumi mengalami trend yang meningkat dari 12,22 tahun pada tahun 2019 menjadi 12,38 tahun pada tahun 2023. HLS Kabupaten Sukabumi masih berada dibawah target yang ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, dimana target yang diharapkan pada tahun 2023 sebesar 12,42 tahun, dan realisasi HLS Kabupaten Sukabumi sebesar 12,38 tahun atau tercapai sebesar 99,68 persen.

Berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata penduduk yang masuk jenjang pendidikan formal di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,38 tahun. Artinya, rata-rata anak-anak usia sekolah di Kabupaten Sukabumi memiliki peluang untuk menamatkan sekolah hingga lulus Sekolah Menengah Atas atau D1. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi yang cenderung stagnan dapat disebabkan oleh kesamaan antara proporsi peningkatan jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia tertentu, sehingga menyebabkan angka harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang tidak signifikan meningkat.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat, HLS Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah HLS Jawa Barat. HLS Jawa Barat sebesar 12,48 tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 12,68 tahun pada tahun 2023. Begitupun apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional, HLS Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah HLS Nasional. HLS Nasional sebesar 12,95 tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 13,15 tahun pada tahun 2023 (Gambar 5).

Harapan lama sekolah Kabupaten Sukabumi berada di peringkat 17 dari kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2023 dimana angka HLS paling tinggi yaitu Kota Ciamis sebesar 14,29 tahun, seperti tertera pada gambar berikut.

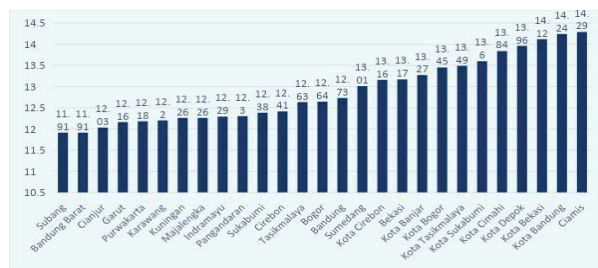

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 6. Grafik Perbandingan HLS Kabupaten Sukabumi dengan HLS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023.

1.1.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menjadi acuan utama untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Upaya-upaya pembangunan pendidikan yang direpresentasikan dalam program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan. Trend perkembangan RLS Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 5. RLS Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

RLS	Target	Realisasi	%
2019	6,61	7,02	106,20
2020	6,66	7,07	106,16
2021	6,71	7,1	105,81
2022	7,32	7,11	97,13
2023	7,43	7,33	98,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

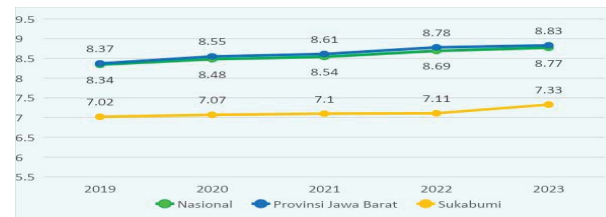

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 7. Trend Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019–2023

RLS Kabupaten Sukabumi terus mengalami *trend* yang meningkat dari 7,02 tahun pada tahun 2019 menjadi 7,33 tahun pada tahun 2023. RLS Kabupaten Sukabumi masih berada dibawah rata-rata RLS Provnsi Jawa Barat. Sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, target RLS Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 sebesar 7,43 tahun sedangkan realisasi RLS sebesar 7,33 tahun atau baru tercapai 98,65 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sukabumi hanya hingga kelas 7 di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, RLS Kabupaten Sukabumi masih berada pada peringkat 3 terbawah, dan lebih baik dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cianjur. Melihat kondisi ini, penguatan program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan RLS Kabupaten Sukabumi perlu ditingkatkan dengan beberapa cara seperti, penguatan program-program pendidikan masyarakat, beasiswa transisi serta beasiswa rawan drop out (DO). Selain itu, mengingat populasi yang menjadi sampel adalah masyarakat dengan usia 25 tahun ke atas (diluar usia sekolah), penguatan program diarahkan pada pendidikan non formal (PNF) atau yang lazim dikenal dengan Kelompok Belajar (Pokjar) Paket setara. Perbandingan RLS Kabupaten Sukabumi dengan RLS Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar berikut.

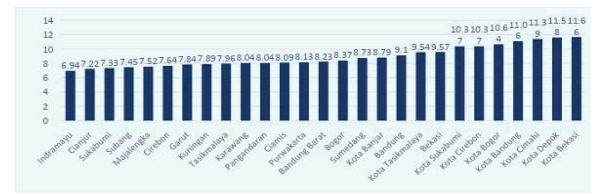

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 8. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023

1.1.3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Trend Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. UHH Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

UHH	Target	Realisasi	%
2019	69,88	70,73	101,22
2020	69,91	70,97	101,52
2021	69,94	71,21	101,82
2022	71,26	71,54	100,39
2023	71,45	71,83	100,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

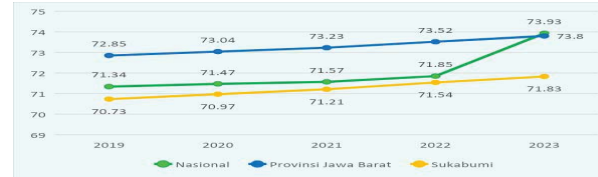

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 9. Trend Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2023

UHH Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya dan melampaui target dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Pada tahun 2019 tercatat usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi sebesar 70,73 tahun dan meningkat menjadi 71,83 tahun pada tahun 2023 atau tercapai sebesar 100,53 persen. Namun demikian, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat. Usia Harapan Hidup rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar 72,85 tahun dan meningkat menjadi 73,80 tahun pada tahun 2023. Begitupun di tingkat nasional, UHH Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata nasional, UHH nasional pada tahun 2019 sebesar 71,34 tahun dan meningkat menjadi 73,93 pada tahun 2023.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi berada di posisi keenam terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat pada tahun 2023. Dengan UHH tertinggi yaitu Kota Bekasi dengan nilai 75,79 tahun dan UHH terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai 70,19 tahun (Gambar 10).

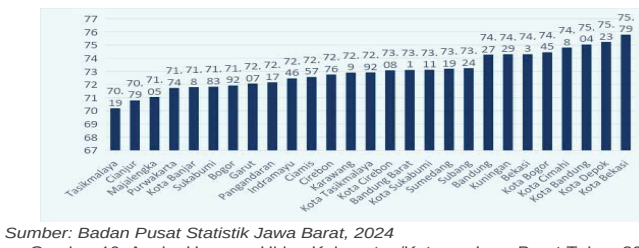

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 10. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023

Menurut ketentuan United Nations Development Programme (UNDP), usia harapan hidup dikelompokkan sebagai berikut:

- Status Rendah : IHH ≤ 50
- Status Menengah Bawah : 50 < IHH ≤ 66
- Status Menengah Atas : 66 < IHH ≤ 80
- Status Tinggi : IHH > 80

Berdasarkan kriteria di atas, maka bisa diketahui bahwa harapan hidup masyarakat di Kabupaten Sukabumi sudah masuk kategori status menengah atas. Oleh karena itu tantangan edukasi dan peningkatan kesejahteraan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan untuk membuat pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi semakin meningkat.

1.1.4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*)

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau *Purchasing Power Parity* (PPP) merupakan indikator ekonomi yang dapat menggambarkan standar hidup layak penduduk. PPP dijadikan sebagai besaran daya beli masyarakat di suatu daerah, upaya pembangunan di sektor ekonomi, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Trend perkembangan PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023, serta perbandingannya dengan rata-rata PPP Jawa Barat dan PPP Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 7. PPP Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
PPP	8.973	8.823	8.850	9.210	9.482

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 11. Trend Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sukabumi sebesar Rp8,97 juta per kapita per tahun, tetapi menurun pada tahun 2020 menjadi Rp8,82 juta per kapita per tahun. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp8,85 juta per kapita per tahun atau mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp9,21 juta per kapita per tahun, atau mengalami kenaikan sebesar 4,07 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9,48 juta per kapita per tahun, atau mengalami kenaikan sebesar 2,95 persen.

Sebagaimana indikator lainnya, daya beli Kabupaten Sukabumi juga masih berada di bawah rata-rata daya beli Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2019 daya beli masyarakat Jawa Barat berada pada level Rp11,15 juta per kapita per tahun dan meningkat menjadi Rp11,69 juta per kapita per tahun pada tahun 2023. Disamping itu juga PPP Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata PPP Nasional. Pada tahun 2019 rata-rata PPP Nasional berada pada level Rp11,29 juta per kapita per tahun dan meningkat menjadi Rp11,89 juta per kapita per tahun pada tahun 2023.

PPP Kabupaten Sukabumi berada di posisi keenam terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat pada tahun 2023. Dengan PPP tertinggi yaitu Kota Bandung sebesar Rp 18,24 juta per kapita per tahun dan PPP terendah adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai Rp8,56 juta per kapita per tahun (Gambar 12).

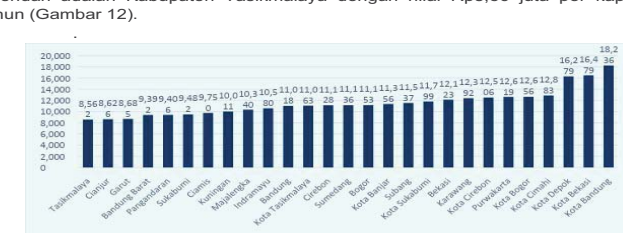

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024
Gambar 12.Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2023

2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

Kabupaten Sukabumi sebesar 1,48 persen per tahun dan mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan pada tahun 2020-2021 yaitu sebesar 1,77 persen. Pada tahun 2022 LPP Kabupaten Sukabumi turun menjadi 1,69 persen. Tahun 2023 LPP Kabupaten Sukabumi turun menjadi 1,02 persen atau tercapai sebesar 114,29 persen dari target yang telah ditentukan. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2022.

Tabel 8. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

LPP	Target	Realisasi	%
2019	0,52	0,23	155,77
2020	0,51	1,53	-100,00
2021	0,5	1,77	-154,00
2022	1,21	1,69	60,33
2023	1,19	1,02	114,29

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024

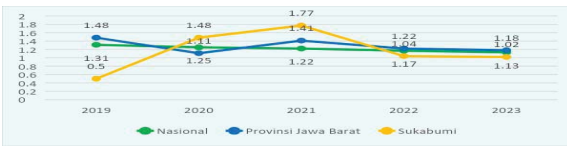

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 13. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019-2023

Sebagai catatan, laju pertumbuhan penduduk idealnya perlu dalam kendali karena sangat berkaitan dengan aspek-aspek strategis yang secara sistemik saling terkait seperti ketenagakerjaan, pangan dan lain sebagainya.

3. Angka Kemiskinan

Menurut BPS penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan nasional serta target Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 9. Angka Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

Angka Kemiskinan	Target	Realisasi	%
2019	7,70	6,22	119,22
2020	7,55	7,09	106,09
2021	7,43	7,7	96,37
2022	6,91	7,34	93,78
2023	6,75	7,01	96,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 14. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Dengan Jawa Barat, dan Target Sukabumi Tahun 2019-2023 (%)

Gambar di atas menunjukkan bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 6,22 persen dan mengalami peningkatan menjadi 7,70 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing menurun menjadi 7,34 persen dan 7,01 persen. Tingkat kemiskinan pada tahun 2023 belum mencapai target RPJMD Kabupaten Sukabumi yaitu 6,75 persen. Namun tingkat kemiskinan Kabupaten Sukabumi lebih unggul dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang masih tinggi yaitu 7,62 persen dan rata-rata Nasional yaitu sebesar 9,36 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2023 mencapai 178,7 ribu jiwa. Dibandingkan tahun 2022, jumlah penduduk miskin menurun 7,6 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,01 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap tahun 2022.

Garis kemiskinan sebagai ukuran nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus diperhatikan agar kebijakan yang dilakukan tidak membuat masyarakat masuk dalam kategori miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 392.705,00 per kapita per bulan. Dibandingkan tahun 2022, garis kemiskinan bertambah sebesar Rp. 35.069,00 per kapita per bulan. Atau sebesar 7,01 persen penduduk Kabupaten Sukabumi memiliki pengeluaran kurang dari Rp 392.705,00 per kapita per bulan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin (Gambar 15).

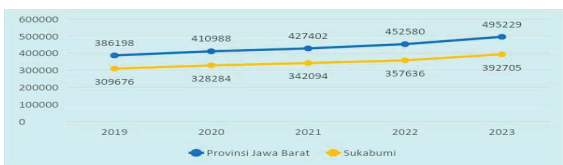

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 15. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019-2023

Ukuran lain yang perlu diperhatikan dalam kemiskinan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode 2019-2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 0,38 poin, atau dari 0,66 persen pada tahun 2019 menjadi 1,04 pada tahun 2021. Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 0,11 persen pada tahun 2019 menjadi 0,23 persen pada tahun 2021, atau sebesar 0,12 poin. Namun pada periode tahun 2021-2022, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,11 poin, atau dari 1,04 persen pada tahun 2021 menjadi 0,93 persen pada tahun 2022. Untuk indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,23 persen pada tahun 2019 menjadi 0,19 persen pada tahun 2022, atau sebesar 0,04 poin.

Pada periode tahun 2022-2023, indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin atau dari 0,93 persen pada tahun 2022 menjadi 1,01 persen pada tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan dari 0,19 persen pada tahun 2019 menjadi 0,23 persen pada tahun 2023, atau sebesar 0,04 poin. Pada periode tahun 2022-2023, nilai indeks kedalaman kemiskinan cenderung meningkat. Ini menunjukan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, semakin menjauhi garis kemiskinan. Hal serupa untuk indeks keparahan kemiskinan, yang memiliki kecenderungan meningkat dalam rentang 2022-2023. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perbandingan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

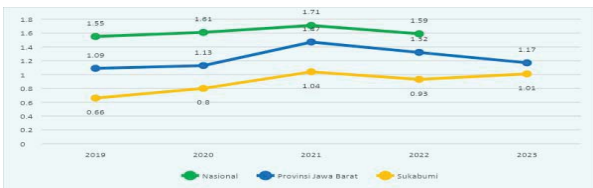

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 16. Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019-2023 (%)

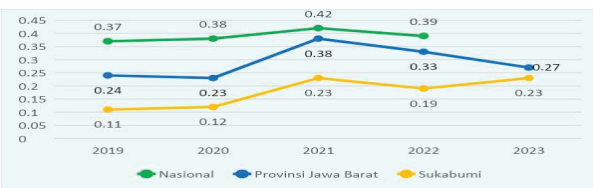

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 17. Perbandingan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019-2023 (%)

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Berikut target dan realisasi TPT Kabupaten Sukabumi periode tahun 2019-2023.

Tabel 10. TPT Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

TPT	Target	Realisasi	%
2019	9,00	7,79	100,00
2020	9,00	9,60	93,33
2021	9,00	9,51	94,33
2022	9 - 11	7,77	129,36
2023	8,75-10,75	7,32	131,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data di atas, pada periode tahun 2019-2021, TPT Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan, dan cenderung berada tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada periode tahun 2022-2023, TPT Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan, dari angka 7,77 persen pada tahun 2022 menjadi 7,32 persen pada tahun 2023, dan angka tersebut melebihi angka yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir, semenjak mencapai puncak tertinggi pada masa Covid-19 yakni pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Sukabumi mencapai angka 9,6 persen dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,32 persen. Angka tersebut lebih kecil dari angka tingkat pengangguran Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 7,44 persen. Namun masih berada di atas TPT Nasional yaitu sebesar 5,32 persen. Hal tersebut menunjukkan lapangan kerja di Kabupaten Sukabumi membaik meskipun belum sepenuhnya pulih.

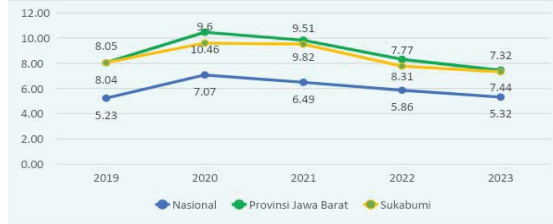

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 18. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (%)

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang termasuk kedalam angkatan kerja, dimana persentase TPAK didapatkan dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikalikan dengan 100 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Sukabumi. Semakin tinggi nilai TPAK suatu daerah maka semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia di daerah tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 11. TPAK Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2022

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
TPAK	62,65	61,56	64,93	69,11	67,75

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024

Pada periode tahun 2019-2020, TPAK Kabupaten Sukabumi cenderung menurun, dari 62,65 persen pada tahun 2019 menjadi 61,56 persen pada tahun 2022. Namun pada periode Tahun 2020-2022, TPAK Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan yaitu dari 61,56 persen pada tahun 2020 menjadi 67,75 pada tahun 2022. Pada Tahun 2023, TPAK Kabupaten Sukabumi kembali mengalami penurunan menjadi 67,75 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja Jawa Barat pada tahun 2023 berada di angka 66,49 persen. Hal tersebut menunjukkan, bahwa persentase pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi di atas rata-rata Jawa Barat.

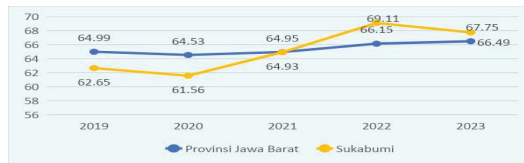

Sumber: Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024

Gambar 19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (%)

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan sebuah pembangunan. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan perbandingannya dengan target indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023

LPE	Target	Realisasi	%
2019	5,73	5,64	98,43
2020	5,78	-0,91	-15,74
2021	5,83	3,74	64,15
2022	2,30	5,12	222,61
2023	3,61	5,17	143,21

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung stabil, namun pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi hingga minus 0,91 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai menyebar secara nasional dan di daerah pada triwulan I tahun 2020.

Perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,65 persen (yoy) dari tahun sebelumnya, atau tercapai 3,74 persen. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 3,74 persen (yoy) dan nasional sebesar 3,69 persen (yoy).

Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen (yoy) dari tahun sebelumnya, atau tercapai 5,12 persen. Sedangkan pada tahun 2023, ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Hal ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Berdasarkan komponen lapangan usaha penyusun, sektor pertanian, industri dan perdagangan yang menjadi kontributor tiap tahunnya relatif turun pada tahun 2023.

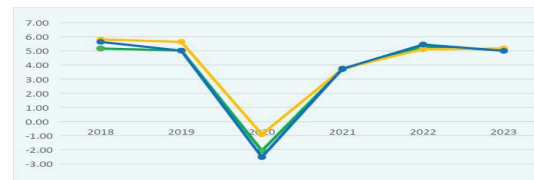

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2024

Gambar 20. Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat tahun 2018-2023

5.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Kabupaten Sukabumi yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 13. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,704.39	8,861.25	9,051.57	9,540.18	9,944.90
B	Pertambangan dan Penggalian	2,668.54	2,743.47	2,833.44	2,945.96	2,972.00
C	Industri Pengolahan	8,019.89	7,934.94	8,367.91	8,880.06	9,366.99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	46.17	44.66	49.06	51.56	54.45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	13.40	16.14	17.68	18.83	19.80
	Sampah, Limbah, dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	5,964.08	5,707.79	6,095.36	6,192.19	6,489.78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,009.45	8,330.45	8,604.06	9,010.53	9,429.12
H	Transportasi dan Pergudangan	3,151.64	3,115.39	3,122.83	3,341.05	3,672.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,225.69	1,175.54	1,175.65	1,294.36	1,370.02
J	Informasi dan Komunikasi	1,615.37	2,035.05	2,204.95	2,356.98	2,526.68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	330.61	336.85	359.01	358.80	371.95
L	Real Estat	976.14	989.05	1,087.28	1,177.33	1,285.65
M, N	Jasa Perusahaan	157.09	141.11	152.54	167.05	178.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,243.02	1,180.19	1,162.24	1,155.80	1,165.96
P	Jasa Pendidikan	2,186.55	2,297.82	2,316.42	2,465.60	2,600.80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	469.19	460.17	493.65	522.63	566.65
R, S, T, U	Jasa Lainnya	847.12	835.42	841.98	909.80	978.87
Produk Domestik Regional Bruto		46,628.34	46,205.28	47,935.63	50,388.72	52,993.98

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi 2024

Gambar 21. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

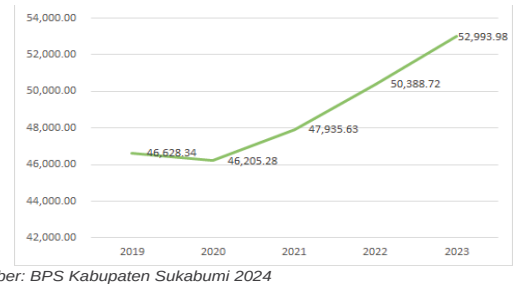

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi 2024

PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor lapangan usaha dari tahun ke tahun dengan telah dikoreksinya faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 s.d. 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,36 triliun. Dimana pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK sebesar Rp 46,628 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp52,993 triliun. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Sukabumi mulai beranjak normal pasca pandemi Covid-19. Secara *year on year*, pada tahun 2023 dari sisi produksi semua lapangan usaha tumbuh positif dengan capaian pertumbuhan terkecil dari sektor pertambangan dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,88 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selaku lapangan usaha utama di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 berkontribusi 22,69 persen pada perekonomian daerah mampu tumbuh 4,24 persen.

Pada tahun 2023 sektor yang memiliki nilai tambah barang dan/jasa tertinggi dibandingkan sektor lain, diantaranya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 9,94 triliun, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 9,429 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 9,36 triliun. Nilai lapangan usaha yang paling tinggi pada rentang tahun 2019 hingga 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lapangan usaha tersebut mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam yang merupakan benda atau barang yang hidup, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk kegiatan penjualan. Nilai lapangan usaha yang paling kecil yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar Rp 19,8 miliar.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Sukabumi tercatat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi, yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 9,91 persen. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 6,99 persen. Diikuti real estate dengan laju pertumbuhan sebesar 9,20 persen. Laju pertumbuhan setiap sektor berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sukabumi menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.13	1.8	2.15	5.4	4.24
B	Pertambangan dan Penggalian	-5.84	2.81	3.28	3.97	0.88
C	Industri Pengolahan	8.88	-1.06	5.46	6.12	5.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.63	-3.28	9.86	5.09	5.6
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8.54	20.44	9.53	6.48	5.2
F	Konstruksi	6.88	-4.3	6.79	1.59	4.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.33	-7.54	3.28	4.72	4.65
H	Transportasi dan Pergudangan	5.66	-1.15	0.24	6.99	9.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.25	-4.09	0.01	10.1	5.85
J	Informasi dan Komunikasi	9.12	25.98	8.35	6.89	7.2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.41	1.89	6.58	-0.06	3.66
L	Real Estat	12.63	1.32	9.93	8.28	9.2
M, N	Jasa Perusahaan	8.19	-10.17	8.11	9.51	6.68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.17	-5.06	-1.52	-0.55	0.88
P	Jasa Pendidikan	9.82	5.09	0.81	6.44	5.48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.75	-1.92	7.27	5.87	8.42
R, S, T, U	Jasa Lainnya	6.24	-1.38	0.78	8.06	7.59
Produk Domestik Bruto		5.64	-0.91	3.74	5.12	5.17

Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi 2024

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi landasan penentuan laju pertumbuhan ekonomi, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kinerja perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 tercatat 5,17 persen, mengalami peningkatan dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya.

6. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita dapat menjadi ukuran kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dengan perbandingan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. Pendapatan per kapita Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 15. Pendapatan Per Kapita (harga berlaku) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2022 (Ribu Rupiah)

PDRB Per Kapita	Target	Realisasi	%
2019	21.414,34	26.968,34	125,94
2020	22.314,34	24.838,34	111,31
2021	23.214,34	25.615,99	110,35
2022	27.548-27.797	27.472,15	99,72
2023	27.879-28.080	29.373,86	104,61

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

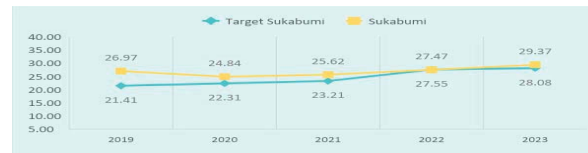

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

Gambar 22. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kabupaten Sukabumi. PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan pada periode tahun 2019-2020. Namun pada periode tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, dari Rp24,84 juta pada tahun 2020 menjadi Rp29,37 juta pada tahun 2023. Artinya satu orang penduduk Kabupaten Sukabumi selama setahun pada tahun 2023 dapat memproduksi barang dan jasa atau memiliki pendapatan senilai Rp 29,37 juta rupiah.

7. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini)

Ketimpangan pendapatan antar penduduk Kabupaten Sukabumi diukur menggunakan rasio gini. Pada tahun 2023, rasio gini Kabupaten Sukabumi berada di 0,355 poin. Angka tersebut naik 0,046 poin dibandingkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,309 poin. Peningkatan rasio gini tersebut disebabkan karena pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi yang dirasakan 40 persen penduduk menengah-bawah lebih kecil porsinya dibandingkan kelompok masyarakat 20 persen teratas.

Apabila nilai rasio gini berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah/negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang cenderung merata (Todaro dan Smith, 2004:226). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sukabumi cenderung merata karena masih berada pada rentang 0,20-0,35 poin. Lebih lanjut, berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 Rasio Gini Kabupaten Sukabumi ditargetkan berada pada rentang 0,356-0,336 poin. Pada tahun 2023, realisasi rasio gini Kabupaten Sukabumi sebesar 0,355 poin atau tercapai 100,28 persen melebihi target yang ditetapkan (Tabel 16).

Namun bila disandingkan dengan kondisi tingkat kedalaman, dan keparahan kemiskinan yang relatif meningkat pada tahun 2023 maka perhatian terhadap ketimpangan dalam kelompok penduduk miskin perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 23.

Tabel 16. Rasio Gini Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Poin)

Rasio Gini	Target	Realisasi	%
2019	n/a	0,347	n/a
2020	n/a	0,334	n/a
2021	n/a	0,343	n/a
2022	0,358-0,338	0,309	108,58
2023	0,356-0,336	0,355	100,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI
DRS. H. MARWAN HAMAMI. MM

WAKIL BUPATI SUKABUMI
DRS. H. IYOS SOMANTRI, M.Si

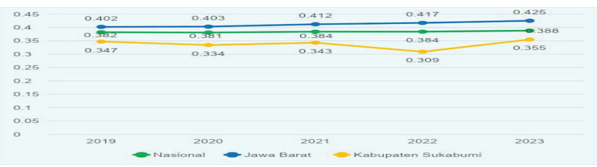

Gambar 23. Trend Perbandingan Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat Tahun 2019– 2023 (poin)

Berdasarkan konstelasi Gini Rasio ditingkat provinsi, Kabupaten Sukabumi berada di posisi ke-sepuluh teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat pada tahun 2023. Gini Rasio tertinggi yaitu Kabupaten Cianjur dengan nilai 0,319 poin dan Gini Rasio terendah adalah Kota Cirebon dengan nilai 0,468 poin (Gambar 24).

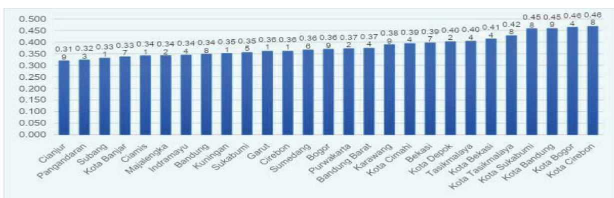

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023

Gambar 24. Perbandingan Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (poin)

C. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMINAL (SPM) URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi standar pelayanan minimal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memfokuskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Capaian kinerja penerapan dan pencapaian SPM urusan wajib pelayanan dasar tahun 2023 Kabupaten Sukabumi mendapatkan Skor 97,73 % dengan KATEGORI TUNTAS UTAMA yang tercantum pada Aplikasi E_SPM Kemendagri, laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Triwulan 4 tahun 2023 pada masing-masing urusan dapat tergambarkan sebagai berikut :

1). Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 17
SPM Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	REALISASI CAPAIAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100 %	98, 94 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar(SD/MI, SMP/Mts)	100 %	99,33 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam PendidikanKesetaraan	100%	99,74 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 98,94 %, jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP) adalah 99,33 % dan jenjang Pendidikan Kesetaraan adalah 96,87%, Sehingga Capaian SPM Urusan Pendidikan mendapat KATEGORI TUNTAS UTAMA dengan angka capaian sebesar 99,74 %.

Berdasarkan pada pencapaian SPM pada tahun 2023 Urusan Pendidikan belum mendapatkan Kategoti Tuntas Paripurna, hal ini di sebabkan dalam implementasi SPM Pendidikan ditemui beberapa masalah antara lain:

1. Pendataan penduduk tidak sekolah
   Sebagaimana diketahui bahwa pendataan penduduk tidak sekolah merupakan hal penting untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih belum terlayani pendidikan. Namun demikian, dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi menjadikan pendataan tersebut cukup sulit dilakukan. Terbatasnya personil pada Dinas Pendidikan juga menjadi hambatan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Oleh

   karenanya diperlukan adanya kerjasama dengan OPD atau pihak lain yang berwenang untuk melakukan pendataan penduduk tidak sekolah.
2. Data pada Rapor Pendidikan belum lengkap
   Rapor pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan serta kualitas pendidikan di suatu daerah. Platporm ini memang masih baru diluncurkan, yaitu baru sekitar dua tahun. Hal ini menyebabkan data pada rapor pendidikan masih belum lengkap. Diharapkan ke depannya data pada Rapor Pendidikan dapat lebih lengkap agar bisa dijadikan salah satu acuan dalam Perencanaan Berbasis Data, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun pada tingkat kabupaten.
3. Terdapat indikator yang pemenuhannya bukan merupakan kewenangan daerah
   Indikator seperti kecukupan guru ASN, proporsi PTK penggerak, dan proporsi PTK bersertifikat bukan sepenuhnya merupakan kewenangan daerah. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam upaya pemenuhannya. Untuk kecukupan guru ASN, daerah hanya bisa mengajukan usulan ke pemerintah pusat. Selanjutnya berkaitan dengan PTK penggerak, saat ini daerah masih belum bisa sepenuhnya melakukan pelatihan berkaitan dengan berbagai keterbatasan. Sedangkan terkait proporsi PTK bersertifikat, daerah hanya bisa memberikan bimbingan kepada PTK agar dapat lulus dalam seleksi PPG.

2). Urusan Kesehatan,

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 18
SPM Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Pelayanan kesehatanbuhamil	Jumlah ibu hamilyang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,17 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96 ,26 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balitayang mendapatkan layanan kesehatan	100%	96,64 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikandasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,51 %
6	Pelayanan kesehatan padausia produktif	Jumlah WargaNegara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	68,94 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,97 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,79 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kabupaten Sukabumi pada dua belas (12) jenis dan mutu layanan dasar mendapatkan angka total capaian sebesar 99,87%, sehingga Capaian SPM Urusan Kesehatan mendapat KATEGORI TUNTAS UTAMA.

Secara keseluruhan pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Tahun 2023 dari 12 indikator SPM Ada 5 indikator yang mencapai target 100% yaitu Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Pada Penderita diabetes melitus, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dan Pelayanan Kesehatan orang dengan tuberculosis Dan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Sedangkan 7 Indikator Laporan SPM Tahun 2023 yang belum mencapai target 100% yaitu indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (98 %) , Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (96 %), Pelayanan Kesehatan Balita (97 %), Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (99 %), Pelayanan Kesehatan Usia 15-59 (69 %) , Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (96 %), Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (95 %), Permasalahan yang di hadapi dalam pencapaian SPM, di antaranya :

1. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil , Kendala yang dihadapi diantaranya :**
   - Adanya K1 akses tidak murni sehingga tidak bisa mencapai indikator K4
   - Adanya persalinan prematurus/ abortus yang meningkat sehingga ibu hamil tidak melalui K4 yaitu 905 kasus yang sudah tercatat di laporan data KIA.
   - Ibu-ibu pekerja didaerah industry memiliki peningkatan cakupan Dropout K4.
   - Ada ibu yang tidak bersedia periksa sebelum kehamilannya terlihat besar, sehingga kualitas ANC K4 tidak terpenuhi.
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin , Kendala Yang dihadapi diantaranya :
   - Masih ada ibu yang masih di kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil di K3 atau K4, sehingga belum bersalin di tahun 2023.
   - Persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan/ Linakes berjumlah 42220/ 97,1 % namun yang bersalin di fasilitas kesehatan 41,867%/ 96,3%. Artinya masih ada masyarakat yang dengan akses sulit tidak berkenan untuk ke Puskesmas dikarenakan jauh dan lebih nyaman untuk memanggil bidan ke rumah untuk menolong persalinannya.
   - Belum semua ibu mau bersalin di petugas kesehatan dikarenakan masih tingginya kepercayaan dari keluarga untuk bersalin oleh paraji/ non nakes/ 620 orang (1,4%) ; Masih ada mitos keluarga bahwa ibu yang tidak mau bersalin keluar dari rumahnya atau pengen di tungguin banyak keluarga saat bersalin di rumah
3. **Pelayanan Kesehatan Balita, Kendala yang di hadapi adalah**
   - 55 % Petugas puskesmas yang terlatih SDIDTK update (Stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang) sedangkan 80 % belum terlatih update dengan tatalaksana gizi buruk dan PMBA sehingga berdampak pada cakupan pelayanan balita menjadi kurang
   - Kepatuhan petugas pkm dalam pelayanan balita MTBS masih kurang atau 35 % puskesmas patuh dan 65 % tdk patuh)
   - Kesadaran Keluarga yang mempunyai balita untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu masih kurang dengan alasan sudah selesai imunisasi.
4. Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar, kendala yang dihadapi diantaranya
   - Kegiatan khusus penjaringan anak sekolah telah dilaksanakan namun kualitas pembinaan berkala minimal 4x belum terlaksana semua sehingga jika tidak terlaksana 1 saja menyebabkan pengaruh ke cakupan kualitas SPM
   - SDM puskesmas terbatas untuk melakukan kunjungan kesemua sekolah dengan jumlah murid yang cukup banyak jika mengikuti sesuai DO dari SPM anak usia sekolah yaitu untuk tahun 2023 yaitu minimal 50% sekolah terlayani sesuai standart dengan begitu harapannya bisa mencapai target 100%.
   - Kit dan buku rapor kesehatanku sebagai logistic tidak ada/ ada tapi cukup sedikit dibandingkan jumlah sekolah dan jumlah murid minimal di setiap strata yaitu kelas 1, 7 dan 10/ tahun, dari Kementrian kesehatan/ Provinsi Jawa barat. Sehingga sulit memantau perkembangan anak didik.
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, kendalanya adalah
   - Masih ada anggapan bahwa posbindu adalah milik sector kesehatan, bukan desa sehingga kurang optimal.
   - Sarana posbindu dan SDM untuk pelaksanaan di tiap desa masih terbatas.
   - Persepsi masyarakat lansia bahwa posbindu untuk wahana berobat bukan kunjungan rutin berkala.
   - SPM lansia tidak hanya lansia dilayani tapi juga lansia dilakukan screening lengkap. Kesulitan melakukan kegiatan tersebut saat berbarengan dengan vaksinasi yang terus terjadwalkan dan petugas terbatas dalam screening
6. Pelayanan Kesehatan Usia 15 – 59, kendala yang dihadapi adalah :
   - FASYANKES BELUM SELURUHNYA MENJALANKAN PEMERIKSAAN BERDASARKAN STANDAR PADA PERMENKES NO. 4 TAHUN 2019;
   - Belum optimal pelaksanaan Deteksi dini program PTM khususna pemeriksaan iva sadanis
   - Data yang sudah in uplod tidak tersingkronisasi di system informasi penyakit tidak menular (SIPTM)
   - Underreporting laporan gangguan indera dimana kegiatan skrining belum di update ke Sistem Informasi PTM (SIPTM
7. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi, kendala yang dihadapi
   - Underreporting laporan gangguan indera dimana kegiatan skrining belum di update ke Sistem Informasi PTM (SIPTM)
   - Pelaporan data skrining prioritas khususnya stroke dan jantung belum optimal di 2023
   - Integrasi program dan Sinkronisasi Data dengan lintas program dan Multisektor belum optimal

3). URUSAN PEKERJAAN UMUM

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 19
SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)	REALISASI CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	94,60 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananpengolahan air limbah domestik	100%	91,70 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Sukabumi pada dua jenis dan mutu layanan dasar adalah 94,60 % capaian Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari dan 91,70 % untuk capaian

Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik. Sehingga Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum mendapat KATEGORI TUNTAS UTAMA dengan total angka capaian sebesar 93,15 %.

Berdasarkan hasil realisasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Belum semua urusan yang telah didelegasikan kepada daerah memiliki SPM yang dikeluarkan oleh kementerian;
b. Terkendalanya anggaran yang ada dan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dalam renstra dan renja SKPD pemangku SPM;
c. Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
d. Indikator SPM masih banyak yang belum diinternalisasikan sebagai target kinerja (output/outcome) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
e. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.
f. Belum sinerginya upaya implementasi SPM.
g. Belum adanya pedoman operasional lanjutan pelaksanaan SPM.
h. Belum tersedianya data base yang akurat di setiap urusan;
i. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun.

4). URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumiadalah sebagai berikut :

Tabel 20
SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumahyang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni	100%	100 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sukabumi pada jenis dan mutu layanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah 100 %, sedangkan capaian jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah 100 %t. Sehingga Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat mendapat KATEGORI TUNTAS PARIPURNA.

Berdasar pada pencapaian SPM pada tahun 2023 maka yang menjadi ***permaslahan*** yang mendasar adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang belum maksimal dalam pendataan target sasaran dari SPM bidang urusan Perumahan Rakyat;
2. Belum adanya SK penetapan jumlah rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang menjadi dasar untuk penetapan target yang terdapat pada RPJMD kabupaten sukabumi;
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai.

Solusi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menentukan atau SK penetapan daerah/jumlah rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang dapat dijadikan target capaian SPM bidang urusan perumahan rakyat.
2. Jumlah masing-masing sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan SPM penyediaan rumah akibat bencana. Singkatnya, semakin banyak tenaga kerja terdidik, jumlah tenaga kerja, dan jumlah mereka yang menerima UMK, maka semakin optimis pemenuhan SPM penyediaan perumahan akibat bencana itu tercapai.

5). URUSAN TRANTIBUM LINMAS

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 21
SPM Urusan TRANTIBUMLinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISAS ICAPAIAN
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	99,57%

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibum Linmas pada jenis dan mutu layanan dasar terdiri dari Sub Urusan Trantibum terdiri dari satu jenis pelayanan dasar dengan KATEGORI TUNTAS PARIPURNA sebesar 100 % %, Sub Urusan Bencana terdiri dari tiga jenis pelayanan dasar dengan KATEGORI TUNTAS PARIPURNA sebesar 100 % dan Sub Urusan Kebakaran terdiri dari satu jenis pelayanan dasar dengan KATEGORI TUNTAS UTAMA sebesar 99,57 %. Sehingga akumulasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas mendapat KATEGORI TUNTAS UTAMA dengan angka capaian sebesar 99,86 %.

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi tingkat capaian SPM Sub Urusan Trantibum agar terus di tingkatkan dan di pertahankan, yaitu :

1. jumlah warga masyarakat yang terdampak tentative / tidak biasa diprediksi;
2. pemahaman masyarakat akan pentingnya trantibum masih kurang;
3. masih kurangnya Angaran;
4. personil dan Sarpras yang terbatas.

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi tingkat capaian SPM Sub Urusan Sub Urusan Bencana yang harus terus ditingkatkan dan dipertahankan dalam rangka siap siaga terhadap bencana yaitu :

1. Masih kurangnya instrumen pendukung yang dapat mengoptimalkan pencapaian SPM
2. Koordinasi Lintas sektoral masih belum berjalan dengan efektif dan efisien
3. Alokasi Anggaran pada BPBD belum mampu untuk memenuhi target SPM mengingat keterbatasan SDM dan Luasnya wilayah penanganan sangat tidak ideal;
4. Pada Tahap Perencanaan, BPBD mengalami kesulitan dalam menetapkan target berdasarkan NIK karena BPBD tidak memiliki data kependudukan pada wilayah rawan bencana, BPBD hanya memiliki data wilayah rawan bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang terdapat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana
5. Penetapan target capaian (Pada SPM Pelayanan informasi rawan bencana dan SPM Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dimana menargetkan Seluruh penduduk terpapar di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Jiwa), sementara seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi adalah wilayah rawan bencana sedangkan jumlah penduduk kabupaten Sukabumi 2,7 juta, sehingga BPBD harus mengerucutkan kembali target berdasarkan tingkat kerawanannya mengingat kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah yang terbatas.

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi tingkat capaian SPM Sub Urusan Kebakaran belum mendapatkan Kategori Tuntas Paripurna, di karenakan :

1. Masih terdapat kejadian kebakaran yang terjadi diluar WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), Sehingga tingkat waktu tanggap 15 menit tidak terpenuhi*;*
2. Belum optimalnya peran atau partisipasi aktif Balakar/Redkar dalam penanggulangan pemadaman kebakaran
3. ;Sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan belum memadai diantaranya; Jumlah Kendaraan unit Pemadam Kebakaran belum maksimal dan kurang optimal diantaranya kondisinya ada yang sudah berumur tua, dan belum tersedianya kendaraan Penyelamatan / Rescue, Jumlah WMK/Pos Pemadam Kebakaran yang terbentuk masih sedikit tidak sebanding dengan potensi kebakaran, Peralatan Pemadam Kebakaran dan peralatan penyelamatan dan evakuasi masih minim, Masih kurangnya APD Petugas Pemadaman dan Petugas Penyelamatan, Peralatan komunikasi masih kurang optimal, Jumlah personil/ sumber daya manusia masih kurang, Jumlah kapasitas sumber daya aparatur yang bersertifikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas masih kurang
4. Masih minimnya regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
5. Dukungan alokasi anggaran masih minim/belum memadai untuk pemenuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran;
6. Optimalisasi operasionalisasi dan mobilisasi Team Fire Rescue dalam memberikan pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)
7. Kurangnya sumber air, antara lain jumlah Hydrant Kota/Halaman yang belum memadai di setiap lingkungan/daerah potensi kebakaran.

6). URUSAN SOSIAL

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 22
SPM Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	76,92 %
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabiltasi social di luar panti	100 %	83,33 %
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	76,92 %
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	100 %	36,36 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	80 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Sosial di Kabupaten Sukabumi pada lima jenis mutu dan layanan dasar di akumulasikan dalam laporan e_SPM dengan mendapatkan KATEGORI TUNTAS UTAMA dengan angka capaian sebesar 94,14 %.

Beberpa permasalahan yang melatarbelakangi tingkat capain SPM Urusan Sosial tidak mendapatkan Kategori Tuntas Paripurna, di karenakan :

1. Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan verifikasi dan validasi lapangan;
2. Luas wilayah dan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari 381 Desa, 5 Kelurahan dan 47 Kecamatan;
3. Perencanaan belum berbanding lurus dengan penganggaran sehingga target tidak tercapai;
4. Dengan adanya keterbatasan anggaran, sub-sub kegiatan SPM yang merupakan mutu capaian keterisian tidak bisa 100%. luas wilayah Kabupaten Sukabumi sangat mempengaruhi juga dalam penjangkauan kasus;
5. Perlu adanya bimbingan teknis berkesinambungan, agar pemahaman SPM sama antar stakeholder untuk meminimalisir multi tafsir dalam penentuan kegiatan yang dilaksanakan.

perencanaan belum sesuai dengan peraturan dan kebijakan pusat, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM; keterbatasan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta berubahnya peraturan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap teknis pelaporan.

D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kementrian Dalam Negeri, bahwa nilai LPPD Kabupaten Sukabumi mendapatkan Kategori Sedang dengan Skor 2,90, sedangkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 mendapatkan Skor 3,4072 dengan Kategori Sedang (Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan Rangking Nasional ke – 30 dari 414 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia dan Rangking ke-4 Tingkat Provinsi Jawa Barat)

2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 belum dapat disajikan, hal tersebut karena masih dalam proses penilaian, sehingga opini BPK pada tahun 2022 menyajikan data tahun 2021, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Sembilan kali berturut-turut WTP dari tahun 2014 s.d. tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapatkan WTP), berikut rincian perolehan nya :

Tabel 23
Capaian Opini LHP BPK- RI

No.	URAIAN	LHP BPK-RI PROVINSI JAWA BARAT	
		HASIL PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN
1	Laporan Keuangan Tahun 2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	18.A/S-HP/XVIII.BDG/07/2011
2	Laporan Keuangan Tahun 2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	03 A/LHP/XVIII.BDG/05/2012 03 B/LHP/XVIII.BDG/05/2012 03 C/LHP/XVIII.BDG/05/2012
3	Laporan Keuangan Tahun 2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	22.A/S-HPXVIII.BDG/05/2013
4	Laporan Keuangan Tahun 2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	08A/S-HP/XVIII.BDG/05/2014
5	Laporan Keuangan Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	46B/S-HP/XVIII.BDG/06/2015
6	Laporan Keuangan Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	39B/S-HP/XVIII.BDG/06/2016
7	Laporan Keuangan Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	20B/S-HP/XVIII.BDG/06/2017
8	Laporan Keuangan Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	25B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018
9	Laporan Keuangan Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	35B/S-HP/XVIII.BDG/05/2019
10	Laporan Keuangan Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	37B/S-HP/XVIII.BDG/06/2020
11	Laporan Keuangan Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	21B/S-HP/XVIII.BDG/05/2021
12	Laporan Keuangan Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	22.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022
13	Laporan Keuangan Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	23.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023

E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan menggambarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 103); dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11 Noreg 11/188/2023, tanggal 30 Oktober 2023 , Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Berita Dearah Tahun 2023 Nomor 39 , tanggal 30 Oktober 2023.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah;
b. Pendapatan Transfer, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa) dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan); dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-laian Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah tercapai sebesar 99,28% dari target, dengan rincian:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 110,10%
- Pendapatan Transfer tercapai 97,83%
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai sebesar 53,34%.
-

Tabel .24
Target dan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 *(unaudited)*

Kode Rekening				Uraian	Jumlah		Lebih/ (Kurang)	
					Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
4				**PENDAPATAN DAERAH**	**4.387.266.611.654**	**4.355.467.381.814**	**(31.799.229.840)**	**99,28**
4	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**685.459.759.768**	**754.657.881.271**	**69.198.121.503**	**110,10**
4	1	1		Pajak Daerah	294.927.000.000	296.621.618.659	1.694.618.659	100,57
4	1	2		Retribusi Daerah	17.155.360.000	15.734.711.666	(1.420.648.334)	91.72
4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000	11.204.895.847	38.745.847	100,35
4	1	4		Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	362.211.249.768	431.096.655.099	68.885.405.331	119,02
4	**2**			**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.655.457.398.886**	**3.576.088.363.929**	**(79.369.034.957)**	**97,83**
4	2	1		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.191.426.323.267	3.139.737.447.322	(51.688.875.945)	98,38
4	2	1	1	Dana Perimbangan	2.732.826.429.267	2.681.137.553.322	(51.688.875.945)	98,11
4	2	1	2	Dana Insentif Daerah (DID)	11.838.424.000	11.838.424.000	0	100,00
4	2	1	5	Dana Desa	446.761.470.000	446.761.470.000	0	100,00
4	2	2		Pendapatan Transfer Antar Daerah	464.031.075.619	436.350.916.607	(27.680.159.012)	94,03
4	2	2	1	Pendapatan Bagi Hasil	355.383.252.409	330.976.016.827	(24.407.235.582)	93,13
4	2	2	2	Bantuan Keuangan	108.647.823.210	105.374.899.780	(3.272.923.430)	96,99
4	**3**			**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**46.349.453.000**	**24.721.136.614**	**(21.628.316.386)**	**53,34**
4	3	1		Pendapatan Hibah	46.349.453.000	24.721.136.614	**(21.628.316.386)**	53,34
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi

2. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kebijakan belanja disusun dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Belanja Daerah dikelompokan kedalam Empat Kelompok belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja. Belanja yang dianggarkan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait langsung dalam mewujudkan visi dan misi daerah. Dalam belanja terdapat program yang sifatnya mendukung program yang berhubungan langsung dengan kinerja RPJMD. Program yang dimaksud adalah program yang membiayai kegiatan rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program-program unggulan di masing-masing bidang dan urusan..

Dalam tahun 2023, jumlah belanja secara keseluruhan sebagaimana tergambarkan pada tabel berikut:

Tabel .25
Target dan Realisasi Belanja
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 *(unaudited)*

Kode Rekenig	Uraian	Jumlah		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
5	BELANJA DAERAH	4.530.012.903.356	4.369.157.230.612	(160,855,672,744.00)	96,45
5 . 1	BELANJA OPERASI	3.321.049.194.961	3.197.443.710.451	(123,605,484,510.00)	96,28
5 . 2	BELANJA MODAL	506.957.125.536	485.582.093.280	(21,375,032,256.00)	95,82
5 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.573.534.525	7.303.837.273	(8,269,697,252.00)	46,90
5 . 4	BELANJA TRANSFER	686.433.048.334	678.827.589.608	(7,605,458,726.00)	98,89
	SURPLUS / (DEFISIT)	(142.746.291.702)	(11.348.761.558)	131,397,530,144.00	

Sumber : BPKAD Kabupaten Sukabumi

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

Untuk Belanja Daerah realisasi mencapai 96,45% yang terdiri dari Belanja Operasi realisasinya mencapai 96,28%, Belanja Modal realisasinya mencapai 95,82%, Belanja Tidak Terduga realisasinya mencapai 46,90% dan Belanja Transfer realisasinya mencapai 98,89%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

- Keterlambatan usulan dari perangkat daerah
- Efisiensi anggaran
- Keterlambatan pengajuan pencairan dari perangkat daerah terutama yang berhubungan dengan pengadaan
- Terjadinya beberapa perubahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, termasuk adanya Pemilu Serentak 2024 dan Pengadaan P3K.

Beberapa solusi telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

- Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan konsultasi ke provinsi dan pusat.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Perangkat Daerah.
- Optimalisasi pengelolaan hibah dan bansos.
- Berkoordinasi dengan perangkat daerah agar mengatur jadwal kegiatan dengan baik.
- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan di perangkat daerah agar dapat merencanaan pengelolaan keuangan dengan baik
- Memberikan petunjuk teknis pada perangkat daerah sehingga proses pencairan bisa lebih cepat tanpa melanggar aturan perundang-perundangan yang berlaku

3. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi, upaya yang dapat ditempuh melalui sisa lebih anggaran tahun lalu dan pencairan dari dana cadangan daerah. Namun seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal serta untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban utang daerah, sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100,00% dari yang direncanakan. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 100,02%.

Tabel .26
Target dan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023 *(unaudited)*

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Lebih/ (Kurang)	
				Anggaran	Realisasi	Rupiah	%
6			PEMBIAYAAN DAERAH	142.746.291.702	142.738.921.951	(7.369.71)	101,51
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.981.291.702	183.981.291.702	0	100,00
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	183.981.291.702	183.981.291.702	0	100,00
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.235.000.000	41.242.369.751	7.369.751	100,02
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	0	7.369.751	7.369.751	0
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000	41.235.000.000	0	100,00
			PEMBIAYAAN NETTO	142.746.291.702	142.738.921.951	(7,369,751)	99,99
			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	129.049.073.153 ,54	129.049.073.1 53,54	0

Sumber : BPKAD Kabupaten

F. INOVASI DAERAH

Percepatan pembangunan Kabupaten Sukabumi perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin besar. Namun demikian, percepatan pembangunan tersebut sering terkendala dengan luasnya wilayah dan kondisi geografis yang bermacam-macam. Oleh karena itu, sebagai upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi mulai digagas beberapa inovasi daerah, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.

Inovasi daerah lahir dari gagasan dan ide para perangkat daerah yang didasarkan pada kondisi terkini kebutuhan masyarakat. Inovasi- inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Beberapa inovasi daerah yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 antara lain:

Tabel. 27
DAFTAR DATA INOVASI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO	INOVASI DAERAH			TAHUN PENERAPAN
	NAMA	JENIS	BENTUK	
DINAS PERTANIAN				
1	DIGIGIT (Digitalisasi Informasi dan Teknologi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
2	Pelayanan Rutin Minggu Pertama Setiap Bulan Mengenai Konsultasi Kemitraan Usahatani (PERMATA SULTAN)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
3	PETAI BASO (Pemberdayaan Petani Barbasis Organik)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
4	Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah Terpadu (SITTBELT)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
5	APIK (Aplikasi PORICI sebagai Pengendali Tikus)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
6	Ngobrol Pintar Masalah Agribisnis (NGOPIMANIS)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
7	"PASINI KERAS" (Fasilitasi Pemasaran Hasil Tani Kedelai Dan Beras)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
8	Sepeda Antik (Strategi Pemasaran Daerah Agribisnis Hortikultura)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
9	Miniatur Bisnis Emas Hijau dari Rumah	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
10	Lumbung Impian (LUMPIA)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
11	SI LABENIK (Sistem Informasi Beras Organik)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
12	SIKUMPAY (Galur Padi Unggul Tahan Penyakit Blas) BPP Kecamatan Curugkembar	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
13	Tamparan Kedelai (Dari Pematang Menuju Hamparan Kedelai) BPP Kecamatan Jampangkulon	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
14	"SETAN SANTUN" (Sentralisasi Pertanian di Kawasan Puncak Pantun) BPP Kecamatan Cibitung	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
15	SIMTARA (Sistem Kelompoktani Purabaya) BPP Kecamatan Purabaya	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
16	JOB TANI (Jumat Online Bareng Petani) BPP Kecamatan Kebonpedes	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
17	Ekspansi "Apih Super" (Agens Pengendali Hayati Solusi Untuk Petani Horti) BPP Kecamatan Kabandungan	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
18	Kangen Si Mantan	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
19	SELING ORGANIK (Selamatkan Lingkungan Dengan Kembali Ke OrganIk)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
20	Mewujudkan Pertanian Organik Melalui Strategi Pangestu (Pertanian Kolaboratif, Penguatan Pemasaran Digital Pupuk Organik)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
21	TAPOS (Tabungan Pupuk Kompos)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
22	PUKDOM (pupuk kompos domba)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
23	KITAKI SUPER	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
24	Google Sites Informasi Pertanian (Gosip)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
25	Dampak Dosol	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
26	Ciptakan Lindi Dari Limbah Sampah Dapur	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
27	SIAGUNG MANIS	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
28	Kartu Informasi Hama Penyakit (KIHP)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
29	LAPAS TANI (Layanan Pendampingan Darimana Saja Kepada Petani)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
30	MIHAPE (Meuli Hamil Ical Cempe)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
31	PODONGHOL (Pupuk Organik Hayati Dongkrak Produksi Hortikultura Lestari)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
32	Turing (Tuturus Jaring)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
33	CIMOL RAPIH (Ciptakan Mikroorganisme Lokal untuk Pekarangan Terpelihara)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
34	BESTIE (Bersama Petani Terapkan Irigasi Hemat Air)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
35	Klik Hati Berjalan	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
36	PRABULINGGA	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
37	PAPATAH (Peningkatan Produktivitas Padi di Lahan Tadah Hujan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
38	TANI EduToursm	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
39	SI KUYA TAPA (ataSi penyakIt KUning pepaya secara TepAt dan cePat dengan APH)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
40	Miniatur Bisnis Emas Hijau dari Rumah	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
41	Ngobrol Pintar Masalah Agribisnis (NGOPIMANIS)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
42	"PASINI KERAS" (Fasilitasi Pemasaran Hasil Tani Kedelai Dan Beras)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
43	Pelayanan Rutin Minggu Pertama Setiap Bulan Mengenai Konsultasi Kemitraan Usahatani (PERMATA SULTAN)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
44	SI_KOMPAK (Sistem Informasi Dan Komunikasi Pembinaan Kelembagaan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
45	Sikumpai, Galur Padi Unggul Hasil Pemuliaan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Genetik Lokal	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
46	Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah Terpadu (SITTBELT)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
47	OPTIMALISASI APLIKASI E-LOK DALAM PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2019 DAN PERMENPAN RB NOMOR 8 TAHUN 2021 DI KABUPATEN SUKABUMI	Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	2022
DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA				
48	MODEL LATIHAN KEBUGARAN JASMANI BERBASIS SENAM GURILAPSS (GUNUNG, RIMBA, LAUT, PANTAI, SUNGAI, SENI BUDAYA) KEPADA MASYARAKAT	Pelayanan Publik	Non Digital	2022
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
49	PENINGKATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENGGUNAAN PETA DIGITAL BERBASIS ANDROID DI WILAYAH KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	2022
50	PENINGKATAN INFORMASI PROSES PENGADAAN TANAH MELALUI PENGGUNAAN SIPANAH (SISTEM INFORMASI PENGADAAN TANAH) DI KABUPATEN SUKABUMI	Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
51	SIDAKEM (Sistem Data Kepegawaian)	Tata Kelola Pemerintaha	Digital	2022
52	Media Informasi Pelatihan	Pelayanan Publik	Digital	2023
53	SILENT CENTER (Sukabumi Integrated Labour and Employeement Center)	Pelayanan Publik	Digital	2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN SATU PINTU				
54	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER)	Pelayanan Publik	Digital	2023
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
55	Optimalisasi Respon Time Pelayanan Non Kebakaran melalui media elektronik DAMKAR CERMAT	Pelayanan Publik	Digital	2023
DINAS PENDIDIKAN				
56	SIMADU (Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru Terpadu) / DINAS PENDIDIKAN	Pelayanan Publik	Digital	2023
57	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Geopark Ciletuh Palabuhanratu Jenjang SD	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
58	Digitalisasi Bahan Ajar Kurikulum Merdeka	Pelayanan Publik	Digital	2023
59	WIPELING (Wirausaha Peduli Lingkungan-Pembuatan Pupuk Organik Cair Guano Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS KETAHANAN PANGAN				
60	SaPA KaMi (Desa Pangan Aman Kabupaten Sukabumi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
61	PasAngAn KaMi (Pasar Pangan Aman Kabupaten Sukabumi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
62	LaPang AnJang KaMi (Gelar Pangan Aman & Terjangkau Kabupaten Sukabumi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
RSUD PALABUANRATU				
63	CINTA OHDIV UPT RSUD Palabuhanratu	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
64	Sistem Daftar Online (SIDOEL)	Pelayanan Publik	Digital	2023
65	Sagaranten Health Care RSUD Sagaranten	Pelayanan Publik	Digital	2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
66	KAPULAGA (Kalau Minggu Kumpul Keluarga)	Pelayanan Publik	Non Digital	2021
DINAS SOSIAL				
67	ESILKESOS (Elektronik Sistem Informasi Lembaga Kesejahteraan Sosisal)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
BAPENDA				
68	V-TAX	Pelayanan Publik	Non Digital	2022
69	RESTI (Retribusi Terintegrasi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2020
70	SIMPAD	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
71	E-PAD	Pelayanan Publik	Non Digital	2022
DINAS DAMKAR				
72	Optimalisasi Response Tim Pelayanan Non Kebakaran Melalui Media Elektronik (METIK) DAMKAR CERMAT	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS PERIKANAN				
73	SIBULAT MERAH (Sistem Budidaya Sidat Tersegmentasi dengan Biaya Murah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2022
DINAS PERHUBUNGAN				
74	SIPRAHUDARAT (Sistem Informasi Prasarana Perhubungan Darat)	Pelayanan Publik	Non Digital	2021
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
75	MOPELING (Mobil Pelayanan Keliling)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
76	MOPELING SARASA (Pelayanan Motor Keliling)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
77	BULIR AIR MATA (Ibu Melahirkan Akta Kelahiran Akta Kematian)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
78	LISDA (Layanan Informasi Seputar Dokumen Adminduk)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
79	PAKU SAWARGA (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Persalinan Warga)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
80	SIMPELIN (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Online)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
81	PELAWAT (Pelayanan Akta Kematian melalui Whatsap)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
82	MENDAKAN MAWAR DESA (Mencetak Dokumen Kependudukan Mandiri Warga Desa)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
83	PAK CAMAT (Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring diKecamatan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
84	PELITA ADMINDUK (Pelibatan Satuan Karya Pramuka Adminduk)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
85	LAYANAN PA BARKAH (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk pasangan baru Nikah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
86	PENGIRIMAN KTP-EL VIA KURIR	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
87	PAK PURNA KUSUKA (Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Purnabakti untuk Sukabumiku)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
88	PAKE SERAGAM PUTIH ABU (Pelayanan Adminduk ke Sekolah agar mudah dan puaskan Kalbu)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS PENDIDIKAN				
89	SIMADU (Sistem Informasi Penerimaan Murid Baru Terpadu) / DINAS PENDIDIKAN	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
90	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Geopark Ciletuh Palabuhanratu Jenjang SD	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
91	Digitalisasi Bahan Ajar Kurikulum Merdeka	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
BAPPELITBANGDA				
92	ROASTING (Rabu Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
93	INSPIRASI (Informasi Pengembangan Riset dan Informasi)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
SEKRETARIAT DAERAH				
94	Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM).Bagian Organisasi	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KESBANGPOL				
95	Pelayanan Izin Penelitian (One Day Service)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DPPKB				
96	Kampung Keluarga Berkualitas/ DPPKB	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
97	Rumah Dataku	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
98	Sekolah Siaga Kependudukan	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
RSUD SEKARWANGI				
99	Tour The Hospital dan Galeri Hospitalia	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
100	Hallo Sekarwangi	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
101	Sistem Integrasi Model Pengendalian Internal (SIMOPI)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
102	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Terpadu (SIPADU)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
103	Elektonik Insiden Keselamatan Pasien (E-IKP)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
104	Perawatan Ramah Anak (Perak)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
105	Sistem Informasi Jasa Pelayanan Remunerasi (SIJAPREM)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
106	Sistem Informasi Layanan Administrasi Kepegawaian (SILASTRIK)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS PARIWISATA				
107	DEWI KURASI JUARA (Desa Wisata Kuliner Terintegrasi Juara)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
108	NATA MASAGI (Menata Pariwisata yang Smart, Berorientasi Sapta Pesona, melalui Atraksi yang Terintegrasi) di Kawasan CPUGGp	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN				
109	Sarana Informasi Perpustakaan (SIPUS)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
110	TANDEM BAPER (Tinggalkan Android Dalam Empat Jam Bareng Perpustakaan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS KESEHATAN				
111	SATUAN TUGAS OPEN DEVECATION FREE (SATGAS ODF)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
112	GETTAS (GERAKAN TEMUKAN DAN TANGANI STUNTING)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
113	Kepiting Merah (Keluarga Peduli Stunting Melalui Gizi Terarah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
114	GELANG ANTING (GERAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
115	SIBUNGA MERAH	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
116	SRI DATUK (SKRINNING DAHAK PASIEN BATUK)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
117	KALIMUSADA SAKTI (Kader Peduli Temukan Sasaran Terduga Sakit Tuberkulosis)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
118	GUMeulls AH (Gerakan Untuk Meningkatkan Ibu hamiL Tetap Sehat dari AIDS HIV)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
119	KUGIGIT SEMUA (KARTU GIGI SEHAT SENYUM CERIA)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
120	OPTIMIS SLIM (OBSERVASI DAN PEMERIKSAAN HIPERTENSI DAN DIABETES MELITUS DI MAJLIS TAKLIM)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
121	KINANTI (AKI-AKI NINI-NINI TEU KEUDAH ANTRI)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
122	GERGAJI STUNTING (Gerakan Bersama Pemenuhan Asupan Gizi Dalam Percepatan Penangangan Percepatan Penurunan Angka Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
123	KATIMUS (Kunjungan Aktifkan Tingkat Masyarakat Untuk Semua Lansia)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
124	SEJIWA RS ZONASI GADAR MATERNAL NEONATAL	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
125	JADWAL INFORMASI PELAYANAN HARIAN PUSKESMAS (JADIAN MAS) DAILY INFORMATION SCHEDULE OF PUSKESMAS SERVICES-	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
126	KAMADRID / Gerakan Masyarakat Peduli Diabetes dan Hipertensi	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
127	PESAT MAJALAH (Penyuluh Kesehatan Remaja Sekolah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
128	POJOK SEHAT "SCBD" (SEHAT, CANTIK, BUGAR DENGAN HERBAL)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
129	SPELING (SKRINING PTM KELILING)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
130	SEHATI (Skrining Kesehatan Satu Tahun Sekali) PTM,HIV,ODGJ,TB	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
131	Dokter Masuk Kampung	Pelayanan Publik	Non Digital	2021
132	SAGATRA (Suami Siaga Trampil	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
133	KITA BESTI (Kelas Ibu dan Balita Bebas Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
134	KOPI TIIS (KONTAK PENGINGAT TUBERKULOSIS)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS PEKERJAAN UMUM				
135	MEDIA DI-GILAS (Digitalisasi Laporan Langsung) Sebagai Transformasi Laporan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A MITRA CAI) Di Kabupaten Sukabumi	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
136	KAPULAGA (Kalau Minggu Kumpul Keluarga)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DPMPTST				
137	SIPINTER (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DESA MUARADUA				
138	JIMAT (Pengajian Jumat)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				
139	SILENT CENTER	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIKEMBAR				
140	Sistem Pendataan Warga Dinamis (SIPENDAWA NITIS)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIKIDANG				
141	BIMOLI	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIKAKAK				
142	SILOWDesa (Sistem Layanan Objek Desa Wisata)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIDOLOG				
143	Pelayanan Perekaman E-KTP	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN GUNUNGGURUH				
144	MASJEKLI (Masyarakat Ojeg Keliling)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
145	Pelayanan Masyarakat Keliling Kecamatan Gunungguruh (MAS'YANLI)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIREUNGHAS				
146	GEMAR MANCING (Gerakan Makan Satu butir Telur sehari untung menurunkan Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
147	RUJAK KOLANG KALING (Rujukan dan Konseling serta Kolaborasi dalam penurunan Prevalensi Balita Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
148	KICIMPRING (Kegiatan Intervensi dan Edukasi untuk menurunkan Prevalensi Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIDADAP				
149	Percepatan Pelayanan KK Dan KTP Melalui Jemput Bola	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN KALIBUNDER				
150	PELAYANAN ADMINDUK CETAR (Cepat, Efektip, Efisien Tanggap dan Responsif) melalui Motoritas JEBOL (Jemput Bola)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN KADUDAMPIT				
151	JIMAT (Pengajian Jumat)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
152	RKS (Rumah Kelola Sampah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN BOJONG GENTENG				
153	SIMADU PATEN (Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Kecamatan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN PURABAYA				
154	SALIMA (Saung Literasi Masyarakat Purabaya)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN PALABUHANRATU				
155	BIDAN AKTAKU	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
156	RESATA (Relawan Sadar Wisata)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
157	Palabuhanratu Genting (GREBEK STUNTING)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
158	Palabuhanratu Dordar (DONOR DARAH)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
159	Kulayani Dengan Islam (ISYA SAMPAI LARUT MALAM)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
160	JUMAT MUHIBAH	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CISOLOK				
161	Pemberdayaan Ekonomil Lokal melalui Pembentukan Forum Komunikasi Pelaku UMKM Terpadu Kecamatan Cisolok	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN NYALINDUNG				
162	PREMATUR CAKEP (Perekaman Teratur Catatan Kependudukan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN JAMPANG KULON				
163	Bank Sampah Pepelin Desa Ciparay	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN KALAPANUNGGAL				
164	Penamas Tandang (Pelayanan Administrasi Untuk Masyarakat Tanpa datang)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIBADAK				
165	SIADI Bumdes Sistem Aplikasi Digital Badan Usaha Milik Desa	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIBITUNG				
166	SABER SWEET SEVENTEEN (Sadar Ber KTP Untuk Seventeen)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN LENGKONG				

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI
DRS. H. MARWAN HAMAMI. MM

WAKIL BUPATI SUKABUMI
DRS. H. IYOS SOMANTRI, M.Si

KECAMATAN CIMANGGU				
169	C.O.C (Cimanggu On Call) Pelayanan Perekaman elektronik-KTP Di Luar Jam Kerja Melalui Model On Call Dan On The Spot	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN GEGERBITUNG				
170	GEBRAK AMBU (Gerakan Berdaya Bergerak Hidroponik Media BAMBU)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
171	PEDIT DUIT (Pemanfaatan Media Digital Dalam Urusan Internal persUratan Kantor)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN PARAKAN SALAK				
172	Seting (Sauyunan Enyahkan Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
173	APPOK (Aplikasi Pelayanan Publik Online Kecamatan)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CISAAT				
174	LAMINATING (Kolam Penitipan Ikan untuk pemenuhan Gizi anak Balita Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
175	Gerbang Surga (Gerakan Membangun Surade Gaul)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIRACAP				
176	Pelayanan Adminduk "Ceria" (Cepat,Efektif,Ramah,Iklas dan Adaptif)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN SAGARANTEN				
177	Cvvv C	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN JAMPANG TENGAH				
178	Quick Access Sistem Data Desa	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CICANTAYAN				
179	Layanan Melalui Wa	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN KABANDUNGAN				
180	Stunting Rangers	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
181	Kepiting Jari	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN SIMPENAN				
182	Sisa Ceting [Simpenan Siap Cegah Stunting]	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN NAGRAK				
183	Matras Cinta	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CARINGIN				
184	Gerakan Dalam Upaya Penurunan angka Stunting Melalui Dapur Bersama Meningkatkan Gizi (GARDU PENTING DARMAJI) pada Kecamatan Caringin	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN PARUNGKUDA				
185	KUDA MANTRASENA Parungkuda Information And Multimedia Public Service Bagi Seluruh Warga Negara	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CURUG KEMBAR				
86	Papanting Madu Kecamatan Curugkembar	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN PABUARAN				
187	SIDATAMA Sistem Pendataan Tanah Masyarakat	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN WALURAN				
188	MAMAH YUSTI (Melalui Amal Jariah Yu Tuntaskan Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CICURUG				
189	SIAGA-LAH Sistem Informasi Pengamanan Gangguan Wilayah	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN BANTAR GADUNG				
190	CHETING SERU (Cegah Stunting dengan Beras NUTRIZINC	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN SUKALARANG				
191	JURASIK (Jumat Sehat Bersama Lintas Sektor)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
192	INSTING SUKALARANG (Interaksi Seluruh Elemen/Stakeholder dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Sukalarang	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN KEBON PEDES				
193	Pelita Mas (Perempuan Literasi Arisp Masyarakat) Kec. Kebonpedes Kab. Sukasumi	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN TEGAL BULED				
194	Serve Village Administration Reports With Love / Melayanilaporan Administrasidesa Dengan Cinta	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN WARUNGKIARA				
195	Kawasan Desa Digital Mekarmanah/Solusi Internet Desa Di Kawasan Blind Spot Mekarmanah (Desa Mekarjaya, Bantarkalong Dan Desa Hegarmanah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIAMBAR				
196	TAKSIR BUMIL (Tanda Deteksi Ibu Hamil) Untuk Pencegahan Stunting	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN SUKARAJA				
197	SIMPEL DESA (Sistem Manajemen Pelayanan Desa)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
KECAMATAN CIEMAS				
198	NYUNDA (Nyumbang Darah)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023
199	GEOPARK TANGINAS (Gerakan Kompak Tanginas Stunting)	Pelayanan Publik	Non Digital	2023

G. PENGHARGAAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dianugerahi berbagai penghargaan.

Penghargaan / Prestasi Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan Lembaga lainnya yang di raih Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 telah berhasil meraih 93 (*Sembilan puluh tiga*) penghargaan dalam berbagai urusan pembangunan, yang terdiri dari:

1) 1 (*satu*) Penghargaan dari Lembaga Setingkat International
2) 38 (*tiga puluh delapan*) penghargaan dari Pemerintah Pusat;
3) 41 (*empat puluh satu*) penghargaan dari Pemerintah Provinsi.
4) 13 (*tiga belas*) penghargaan dari lembaga lainnya baik pemerintah/non pemerintah

Adapun penghargaan dan prestasi yang telah dicapai pada periode Tahun 2023 dimaksud diuraikan pada tabel :

Tabel. 28
DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2023

I. PENGHARGAAN TINGKAT INTERNASIONAL

NO	JENIS PENGHARGAAN	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1.	SERTIFIKAT UNESCO ATAS KEBERHASILAN CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS UNESCO GLOBAL GEOPARK UNTUK PERIODE 2022 SAMPAI 2025	UNESCO GLOBAL GEOPARK	THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNESCO GLOBAL GEOPARK YANG DISELENGGARAKAN DI M'GOUN UNESCO GLOBAL GEOPARK, MAROKO 5-14 SEPTEMBER 2023

II. PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL

NO	JENIS PENGHARGAAN	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1.	RUMAH SAKIT RUJUKAN YANG SANGAT BERKOMITMEN UNTUK MELAKUKAN UPAYA KEMANUSIAAN DALAM MERESPON DARURAT BENCANA GEMPA BUMI CIANJUR	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	JAKARTA, 16 JANUARI 2023
2.	EVENT HARI NELAYAN PALABUHANRATU DAN EVENT SEREN TAUN CIPTA GELAR PADA AJANG KARISMA EVENT NASIONAL (KEN) 2023	KEMENPAREKRAF	PALABUHANRATU, 28 JANUARI 2023
3.	PENGHARGAAN KEPALA DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM TRANSMIGRASI	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI	BANDUNG SELASA, 16 MEI 2023
4.	PENGHARGAAN LENCANA BHAKTI TRANSMIGRASI UNTUK BUPATI SUKABUMI ATAS KONTRIBUSI DAN KERJA KERAS DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM TRANSMIGRASI	KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI	GRAHA SABHA PRAMANA (GSP) UGM SLEMAN DI YOGYAKARTA, SELASA 16 MEI 2023
5.	KALPATARU - PERINTIS LINGKUNGAN ASEP HIDAYAT MUSTOPA KALPATARU	KLHK	JAKARTA, 5 JUNI 2023
6.	PEMERINTAH KABUPATEN PREDIKAT KATEGORI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK TERBAIK SEKTOR PEMERINTAH KABUPATEN	BSSN (BADAN SIBER SANDI NEGARA)	09 JUNI 2023 BSSN AWARD DI AVENZEL HOTEL AND CONVENTION, CIBUBUR, BEKASI, JAWA BARAT.
7.	PENGHARGAAN SATYALENCANA WIRA KARYA TERHADAP BPK BUPATI KABUPATEN SUKABUMI	PRESIDEN RI (DISERAHKAN OLEH MENTERI PERTANIAN)	PEKAN NASIONAL (PENAS) XVI, TAHUN 2023 DI PADANG SUMATERA BARAT. 10 JUNI 2023
8.	PENGHARGAAN UNTUK KELOMPOK TANI / KTNA ATAS PRESTASI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN SUKABUMI	KEMENTERIAN PERTANIAN (DISERAHKAN OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT)	PEKAN NASIONAL (PENAS) XVI, TAHUN 2023 DI PADANG SUMATERA BARAT. 10 JUNI 2023
9.	PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) UNTUK KATEGORI NINDYA TAHUN 2022	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL KE-39 DI HOTEL PADMA, SEMARANG, JAWA TENGAH, SABTU, 22 JULI 2023
10.	DAFA AWARD FORUM ANAK "PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PPAP)	KEMENTRIAN PPA RI	
11.	PENGHARGAAN WREDATAMA NUGRAHA MADYA TAHUN 2023	PWRI PUSAT	AULA BARAT GEDUNG SATE BANDUNG, SENIN (24/07).
12.	WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN) ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI	BPK-RI	HOTEL MASON PINE KOTA BARU, PARAHYANGAN, BANDUNG, 8 AGUSTUS 2023
13.	MEMBINA DAN MENGUKUHKAN DESA-DESA BINAAN DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI DESA SADAR HUKUM	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	BANDUNG, 2 SEPTEMBER 2023
14.	PIAGAM PENGHARGAAN PENGANUGRAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2023, DENGAN NILAI 90,14/ZONA HUJAU KUWALITAS TERTINGGI) PADA DINAS KESEHATAN KAB. SUKABUMI	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SK KETUA OMBUDSMAN RI NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	JAKARTA, 14 SEPTEMBER 2023
15.	PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN NILAI 94,39 DAN MENDAPAT PREDIKAT ZONA HIJAU (KUALITAS TERTINGGI) PADA DPMTSP KAB. SUKABUMI	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	JAKARTA, 14 SEPTEMBER 2023
16.	JUARA 3 SEBAGAI PASANGAN MUDA INSPIRATIF DAN BERPRESTASI TINGKAT JAWA BARAT (A.N RESI PUTRI RAHMAWATI)	KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	JAKARTA, 15 OKTOBER 2023
17.	SWASTI SABA WISTARA KAB SUKABUMI DALAM PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2023	KEMENKES RI (KEPMENKES RI NOMOR : HK.01.07/2087/2023)	JAKARTA, 28 NOVEMBER 2023
18.	PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUKABUMI TERSTANDARISASI, PUSAT SAHABAT ANAK (PISA) TAHUN 2023 KATEGORI PRATAMA	KEMENTERIAN PPPA RI	25/11/2023
19.	KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM TAHUN 2022	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	JAKARTA, 15 NOVEMBER 2023
20.	TERBAIK DALAM VERIIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA BERESIKO STUNTING	BKKBN RI	MENARA DANAREKSA JAKARTA, 28 NOVEMBER 2023
21.	PENGHARGAAN BUPATI INSPIRATIF PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)	PROF. DR. SETO MULYADI, S.PSI., M.SI.	AULA POLRES SUKABUMI, SENIN, 31 JULI 2023
22.	KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN KATEGORI "MEMUASKAN"	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1 DESEMBER 2023
23.	PIAGAM PENGHARGAAN PENGANUGRAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2023 (DENGAN NILAI 87,75/ZONA HUJAU KULAITAS TINGGI) PADA PEMDA KAB.SUKABUMI	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SK KETUA OMBUDSMAN RI NOMOR 418 TAHUN 2023 TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023	JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
24.	PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023, NILAI PREDIKAT ZONA HIJAU DENGAN OPINI PADA KUALITAS TINGGI. (DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI	OMBUDSMAN RI	JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
25.	PENGHARGAAN PENGANUGERAHAAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2023 PADA DINAS KESEHATAN KAB. SUKABUMI	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
26.	PENGHARGAAN PENGANUGERAHAAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) TAHUN 2023 PADA DINAS SOSIAL KAB. SUKABUMI	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
27.	PENGHARGAAN TEMATIK PHA KATEGORI PUSPAGA UTAMA (PUSPAGA KAB. SUKABUMI)	KEMENTERIAN PPPA RI	AUDITORIUM PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA, 18 DESEMBER 2023
28.	PENGHARGAAN TEMATIK PHA KATEGORI SEKOLAH RAMAH ANAK TERSTANDARISASI (SMPN 2 NAGRAK)	KEMENTERIAN PPPA RI	AUDITORIUM PERPUSTAKAAN NASIONAL JAKARTA, 18 DESEMBER 2023
29.	PENGHARGAAN APE (ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA) KATEGORI PRATAMA	KEMENTERIAN PPPA RI	STUDIO METRO TV JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 19 DESEMBER 2023
30.	PENGHARGAAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DALAM RANGKA UHC AWARD TAHUN 2023	KEMENKO PMK RI	14 MARET 2023
31.	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TAHUN 2022	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	12 MEI 2023
32.	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 9 KALI BERTURUT TURUT	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	13 MEI 2023
33.	PENGHARGAAN SEBAGAI DUTA RUPIAH PADA PUTRI OTONOMI INDONESIA TAHUN 2023	APKASI INDONESIA	23 JUNI 2023
34.	PENGHARGAAN BKN AWARD 2023 ATAS PENCAPAIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERINGKAT KE 3	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	15 AGUSTUS 2023
35.	PENGHARGAAN JUARA STAND TERBAIK PADA APKASI OTONOMI EXPO 2023	APKASI OTONOMI EXPO (AOE)	15 AGUSTUS 2023
36.	PENGHARGAAN PARALEGAL JUSTICE AWARD (DESA CIKURUTUG KECAMATAN CIREUNGHAS)	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3 SEPTEMBER 2023
37.	PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA LIBRARY VIRTUAL TOUR (LVT) PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL	PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	20 SEPTEMBER 2023
38.	PENGHARGAAN KATEGORI KONSERVASI GEOLOGI PADA MALAM PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN SUBROTO	KEMENTERIAN ESDM	29 SEPTEMBER 2023

II. PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI

NO	JENIS PENGHARGAAN	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1.	CAPAIAN TERCEPAT KESATU PEMUTAHIRAN PENDATAAN KELUARGA WILAYAH BESAR	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL HOLIDAY INN BANDUNG , 30 JANUARI 2023
2.	TERBAIK PENCAPAIAN DENGAN 100% DALAM REALISASI ANGGARAN BOKB PENGGERAKAN PELAYANAN KB MKJP TAHUN 2022	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	GREEN FOREST HOTEL BANDUNG, 30 JANUARI 2023
3.	JUARA 1, LOMBA BUMDES/BUMDESMA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (BUMDSEMA NABIYA LKD KECAMATAN NAGRAK)	DPMD PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 2 PEBRUARI 2023
4.	PELAKSANA PROGRAM KESEHATAN KERJA TERBAIK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 (NOMOR : 8415/KS.02.03/KESMAS)	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 07 FEBRUARI 2024
5.	PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TERBAIK III KATEGORI KABUPATEN DENGAN PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TERBAIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 24 MARET 2023
6.	KEPALA OPERASIONAL BAYU TERBAIK	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 03 MEI 2023
7.	ASET AWARD JABAR JUARA KE TIGA KATEGORI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKAD PROVINSI JAWA BARAT	KANTOR BPK RI PERWAKILAN JAWA BARAT BANDUNG, 12 MEI 2023
8.	PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH DAERAH (PORPEMDA) XV JAWA BARAT (1 PERAK 3 PERUNGGU)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAWA BARAT	KUNINGAN, 29 NOVEMBER 2023
9.	JUARA PADA PEKAN OLAHRAGA PARALIMPIK DAERAH (PEPAPERDA) III JAWA BARAT (2 PERAK)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAWA BARAT	GARUT, 28 JUNI 2023
10.	JUARA PADA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (POPDA) XIII JAWA BARAT (5 EMAS, 7 PERAK & 9 PERUNGGU)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAWA BARAT	BANDUNG, 10 JULI 2023
11.	JUARA 1, LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (POSYANTEK DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK)	DPMD PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 17 JULI 2023
12.	JUARA 2, LOMBA POSYANDU TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (POSYANDU MAWAR DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN)	DPMD PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 18 AGUSTUS 2023
13.	HARAPAN 1 BPP BERPRESTASI TINGKAT PROVINS JAWA BARAT TAHUN 2023 YANG DISERAHKAN DI KOTA BANDUNG	PROVINSI JAWA BARAT	11 AGUSTUS 2023
14.	TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) KABUPATEN TERBAIK 2023	GUBERNUR JAWA BARAT	BANDUNG, 1 SEPTEMBER 2023
15.	PENERAPAN TTE TERBAIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2023 KATEGORI PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERBANYAK PADA SANDIKAMI AWARD 2023	GUBERNUR JAWA BARAT	GEDUNG SATE, SABTU, 02 SEPTEMBER 2023
16.	UNIVERSAL HEALTH COVERAGE AWARD (NOMOR : 00.2.6/KEP.666-BKD/2023	GUBERNUR JAWA BARAT	BANDUNG, 22 SEPTEMBER 2023
17.	JUARA 1, LOMBA GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP TANGGUH BENCANA PEDULI STUNTING TK. PROVINSI JAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, OKTOBER 2023
18.	TERBAIK DALAM DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA PROGRAM BANGGA KENCANA	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL BURZA YOGYAKARTA NOVEMBER 2023
19.	CAPAIAN TERCEPAT KESATU PEMUTAHIRAN PENDATAAN KELUARGA WILAYAH BESAR	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL HORISON PANGANDARAN, 27 NOVEMBER 2023
20.	TERBAIK KESATU DALAM KEGIATAN SSK KATEGORI SMA	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL HORISON PANGANDARAN, 27 NOVEMBER 2023
21.	TERBAIK KETIGA DALAM KEGIATAN SSK KATEGORI SMP	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL HORISON PANGANDARAN, 27 NOVEMBER 2023
22.	TERBAIK KE TIGA ATAS PELAKSANAAN AUDIT KASUS STUNTING TAHUN 2023	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL GRAND SUNSHINE BANDUNG, 29 NOVEMBER 2023
23.	TERBAIK HARAPAN 2 APRESISASI DUTA GENRE TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT	BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	HOTEL GRAND SUNSHINE BANDUNG, 29 NOVEMBER 2023
24.	JUARA I KEGIATAN INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF (IP2K) - TEMA 5 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA TERINTEGRASI - KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KOMPETITIF (NATA MASAGI DAN DEWI KURASI JUARA)	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	27 DESEMBER 2023
25.	PENGHARGAAN ANU BHAWA SASANA DESA/KELURAHAN	PROVINSI JAWA BARAT	AULA BARAT GEDUNG SATE BANDUNG, SABTU (02/09/2023).
26.	JUARA II TENAGA PENDATA INDUSTRI TK.PROVINSI JAWA BARAT	INDAG PROVINSI JAWA BARAT	AULA BARAT GEDUNG SATE BANDUNG, SELASA 30 MEI 2023
27.	PENGANUGERAHAN PEMENANG PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PARITRANA AWARD TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI PERUSAHAAN USAHA LAYANAN PUBLIK YAITU PT. MEDIKALOKA SUKABUMI (RS. HERMINA).	PROVINSI JAWA BARAT	AULA BARAT GEDUNG SATE BANDUNG, SELASA 30 MEI 2023
28.	JUARA KE-III LOMBA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) KATEGORI KABUPATEN TAHUN 2023	PROVINSI JAWA BARAT	GEDUNG CONVENTION UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KABUPATEN CIREBON, 20 DESEMBER 2023
29.	PENGHARGAAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2023 (PERAHU KERTAS)	PROVINSI JAWA BARAT	
30.	PENGHARGAAN JUARA KE TIGA (3) KOMPETISI INOVASI JAWA BARAT (KIJB) 2023 KOMPETISI INOVASI ATAS INOVASI DARI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI -SILENT CENTER (SUKABUMI INTEGRATED LABOUR AND EMPLOYMENT CENTER).	PROVINSI JAWA BARAT	THE PAPANDAYAN HOTEL, KOTA BANDUNG, SELASA, 3 OKTOBER 2023
31.	PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI - BABAKANPARI KATEGORI DUNIA USAHA PEDULI LINGKUNGAN	DLH PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 7 DESEMBER 2023
32.	JUARA II STAND TERBAIK PADA PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA TINGKAT PROVINSI	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	25 NOVEMBER 2023
33.	PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT (DRH. BUDINA EKA PRASETIA KEPALA UPTD PETERNAKAN DAN PUSKESWAN WILAYAH SUKABUMI KATEGORI PEGAWAI INSPIRATIF)	PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG, 24 NOVEMBER 2023
34.	FESTIVAL PENCAK SILAT JAWA BARAT (PENAMPIL TERBAIK KATEGORI PUTRA DAN PUTRI)	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAWA BARAT	CIREBON, 22 NOVEMBER 2023
35.	PENGHARGAAN PENYELENGGARA TERBAIK DAN PENGHARGAAN FASILITATOR TERBAIK SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA (SEKOPER CINTA) TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	CONVENTION HALL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON, 20 DESEMBER 2023
36.	PERINGKAT KE - 3 PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS) DESA KEBONPEDES TAHUN 2023	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	CONVENTION HALL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON, 20 DESEMBER 2023
37.	PENGHARGAAN KATEGORI A DENGAN NILAI 85,85 PADA KEGIATAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL KAB/KOTA SE JAWA BARAT TAHUN 2023	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	28 PEBRUARI 2023
38.	PENGHARGAAN ATAS DUKUNGAN PENUH DALAM ARSIP UGC-CILETUH PALABUHANRATU SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	28 PEBRUARI 2023
39.	PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TERBAIK III KATEGORI KABUPATEN DENGAN PEMBANGUNAN TERBAIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	21 MARET 2023
40.	PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KATEGORI NINDIYA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	19 AGUSTUS 2023
41.	PENGHARGAAN JUARA III LOMBA MASAK BERBAHAN BAKU IKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	3 SEPTEMBER 2023

III. PENGHARGAAN DARI INSTANSI/LEMBAGA/NGO LAINNYA

NO	JENIS PENGHARGAAN	LEMBAGA PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1.	THE BEST HOSPITAL IN SERVICE & PERFORMANCE EXCELLENT OF THE YEAR	INDONESIA ACHIEVEMENT CENTER	BANDUNG, 4 FEBRUARI 2023
2.	PENGHARGAAN ANUGERAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA SEBAGAI BUPATI PEDULI RADIO - TV PEMERINTAH	GRAND INNA SAMUDERA BEACH HOTEL, PALABUHANRATU. RABU (3/5/23).
3.	PENGHARGAAN TOURISM ENTREPRENEURIAL RECOGNITION PADA AJANG TOURISM MARKETING AWARDS	MARKPLUS INC.	15 JUNI 2023
4.	JUARA STAND TERBAIK KATEGORI KREATIF PADA KEGIATAN APKASI OTONOMI EXPO 2023	APKASI (ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SULURUH INDINESIA)	JAKARTA, 22 JULI 2023
5.	STUDENT ATLETIC CHAMPIONSHIP (1 EMAS AN. YOGI)	PB PASI INDONESIA	SURAKARTA, 26 JUNI 2023
6.	PENGHARGAAN ANUGERAH PROGRAM TERPUJI KATEGORI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	DETIK JABAR	THE TRANS LUXURY HOTEL, BANDUNG. SELASA 20 JUNI 2023
7.	PENGGERAK DONOR DARAH SUKARELA	PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	MARKAS PMI, JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023.
8.	PENGHARGAAN SEBAGAI JUARA 1 LPPL TELEVISI INDONESIA TERBAIK DALAM RANGKA RAKORNAS DAN LPPL AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023
9.	PENGHARGAAN SEBAGAI JUARA 1 LPPL PROGRAM ACARA TALKSHOW TERBAIK DALAM RANGKA RAKORNAS DAN LPPL AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023
10.	PENGHARGAAN SEBAGAI JUARA 1 LPPL RADIO INDONESIA TERBAIK DALAM RANGKA RAKORNAS DAN LPPL AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023
11.	PENGHARGAAN SEBAGAI JUARA 1 LPPL PRODUKSI SUARA NUSANTARA VERSI AUDIO DALAM RANGKA RAKORNAS DAN LPPL AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023
12.	PENGHARGAAN SEBAGAI JUARA 2 BINTANG RADIO LPPL INDONESIA TERBAIK DALAM RANGKA RAKORNAS DAN LPPL AWARD KE 3 TAHUN 2023	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023
13.	PENGHARGAAN SEBAGAI KEPALA DINAS KOMINFO PEDULI RADIO MEDIA INFORMASI (EKA NANDANG NUGRAHA, S.IP., M.Si)	ASOSIASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO DAN TELEVISI INDONESIA	3 MEI 2023

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan. Beberapa capaian kinerja pembangunan berdasarkan pendekatan indikator makro yang diperlukan untuk mengukur perkembangan sosial dan ekonomi Kabupaten Sukabumi berdasarkan kecenderungan (*trend*) beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi bertekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mencapai sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi Dalam Menyelenggarakn Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sukabumi Dalam Mewujudkan **"Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin**

Palabuhanratu, 28 Maret 2024

BUPATI SUKABUMI,

TTD

Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM